

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Perbankan

Pengertian bank menurut kamus perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Prof. G. M. Verryn Stuart mendefinisikan: Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

Fungsi Bank

1. Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan

lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang atau jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

5. Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (*safety box* atau *safe deposit box*). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

6. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon

membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank sebagai tempat pembayaran.

Dalam penelitian ini fungsi bank yang digunakan adalah fungsi intermediasi dana masyarakat dimana bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Fungsi bank yang lain bukan merupakan fokus dalam penelitian ini sehingga tidak digunakan.

Menurut Kasmir (2001) terdapat beberapa jenis perbankan di Indonesia ditinjau dari beberapa aspek antara lain:

1. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dilihat dari segi kepemilikan, bank umum dibedakan menjadi:

- a. Bank Pemerintah

Bank dimana pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

- b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank dimana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendirianpun didirikan oleh swasta, pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Bank milik swasta nasional terdiri dari:

1. Bank Milik Koperasi, bank dimana kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.
2. Bank Milik Asing, merupakan bank cabang dari bank yang ada di luar negeri yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri.
3. Bank Milik Campuran, merupakan bank yang dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan saham mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia.

Dilihat dari segi statusnya, bank terdiri dari:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Pernyataan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

2. Bank Syariah

Dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga berdasarkan prinsip syariah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasar pada prinsip penyertaan modal

(musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), dan pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah). Sedang penentuan biaya jasa bank lainnya juga sesuai dengan Syariah Islam dan sebagai dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rosul.

3. Bank Sentral

Bank sentral merupakan bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan atau penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

Setelah dipaparkan jenis-jenis bank kemudian penelitian ini difokuskan untuk melihat fungsi intermediasi pada bank umum sehingga jenis bank yang lain tidak digunakan dalam penelitian ini.

2.2 Teori Kredit

Dalam memenuhi fungsi bank sebagai penyalur dana dari masyarakat maka bank memberikan dana dalam bentuk kredit sehingga dapat membantu masyarakat. Menurut UU No.10 Pasal 1 Ayat 11 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2004), prinsip-prinsip penilaian kredit yang dilakukan dengan analisis 5C yang terdiri dari faktor sebagai berikut:

1. *Character*, adalah sifat atau watak calon debitur. Hal ini bertujuan memberikan keyakinan kepada pihak perbankan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit dapat dipercaya.
2. *Capacity*, adalah kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan calon debitur tersebut dalam mengelola bisnis serta kemampuannya mendapat keuntungan.
3. *Capital*, adalah sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usaha yang dilakukannya.
4. *Collateral*, adalah jaminan yang diberikan calon debitur baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan yang diberikan dianjurkan melebihi jumlah kredit yang diberikan.
5. *Condition*, adalah penilaian kredit yang mempertimbangkan kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang.

Selain itu prinsip pemberian kredit lainnya adalah 5 P, yaitu:

1. *Party* (golongan)

Menggolongkan debitur menurut *character*, *capacity*, dan *capital* sehingga kreditur memiliki keyakinan kepada debitur.

2. *Purpose* (tujuan)

Bank perlu mengetahui tujuan permohonan kredit sehingga bank dapat mempertimbangkan kredit tersebut dapat berguna bagi debitur.

3. *Payment* (pembayaran)

Penilaian apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur tersedia dan aman serta apakah setelah pemberian kredit debitur memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk pembayaran kredit.

4. *Profitability* (kemampuan memperoleh laba)

Penilaian terhadap kemampuan debitur menghasilkan laba yang lebih besar daripada bunga dan pokok kredit.

5. *Protection* (perlindungan)

Perlindungan terhadap resiko kredit macet perlu dilakukan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah bekerjasama dengan pihak asuransi.

Prinsip pemberian kredit yang penting lainnya adalah 3 R, yaitu:

1. *Return*

Penilaian penghasilan apakah usaha yang akan dibiayai benar-benar suatu usaha yang memberikan hasil didasarkan pengalaman, kemampuan, pemasaran dan aspek lainnya.

2. *Repayment Capacity*

Penilaian kesanggupan membayar kembali kredit apakah nasabah benar-benar memiliki kemampuan untuk mengembalikan kredit bank. hal ini ditilik dari segi aliran kas, keuntungan yang akan diperoleh, watak yang dimiliki oleh nasabah.

3. *Risk Bearing Ability*

Penilaian kemampuan untuk menutup resiko yang mungkin timbul jika kredit menjadi macet.

Dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit tersebut diharapkan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tidak menjadi kredit macet.

Kredit dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: kredit konsumsi, kredit modal kerja dan kredit investasi, berikut adalah definisi kredit konsumsi, kredit modal kerja dan kredit investasi menurut Laporan Bank Umum (LBU) dalam www.bi.go.id:

1. Kredit konsumsi adalah pemberian kredit untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Misalnya: Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Multiguna, Kredit Pegawai dan Pensiunan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).
2. Kredit modal kerja adalah kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja debitur.

3. Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.

Dari ketiga jenis kredit tersebut maka kredit dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kredit produktif dan kredit konsumsi. Kredit produktif dan kredit konsumsi memiliki mekanisme pencairan kredit yang berbeda. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (2009) membandingkan karakteristik kredit produktif dan kredit konsumsi sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perbandingan Karakteristik Kredit Konsumsi dan Kredit Produktif

| | Kredit Konsumsi | Kredit Produktif |
|------------------------------|--|---|
| Proses persetujuan Kredit | 1-3 hari | minimal 12 hari |
| Persyaratan pengajuan kredit | Slip gaji, SK Pegawai/Keterangan Bekerja, tabungan (kredit pegawai/pensiunan dan kredit multiguna) | Dokumen legalitas usaha (NPWP, SIUP, TDP, akta pendirian, keterangan domisili usaha dan surat keterangan usaha) |
| Biaya kredit | Biaya administrasi, provisi, notaries dan asuransi | Biaya administrasi, provisi, notaris, asuransi, biaya pengikatan dan biaya peninjauan jaminan |
| Suku bunga | 10% s.d 20% (flat) | 10% s.d 20% (efektif) |
| Jangka waktu | 1 s.d 5 tahun | Modal kerja 1 tahun dan investasi s.d 5 tahun |

Sumber: Bank Indonesia (Hasil Kajian Kredit Konsumsi Mikro, Kecil dan Menengah Untuk Kegiatan Produktif Tahun 2009)

Terjadinya kredit dipengaruhi oleh beberapa unsur, menurut Kasmir (2004) beberapa unsur yang mempengaruhi terjadinya kredit adalah:

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan benar-benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka waktu

Jangka waktu adalah batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (di atas 3 tahun).

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan terjadinya suatu resiko kredit macet atau kredit tak tertagih. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit maka semakin besar

resiko, sedangkan semakin pendek jangka waktu kredit maka semakin kecil tingkat resiko.

5. Balas Jasa

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa juga sering disebut bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan kepada nasabahnya biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi bank.

Unsur-unsur yang mempengaruhi pemberian kredit tersebut tidak lepas dari prinsip kehati-hatian dan fungsi bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.

Dalam memberikan kredit bank memiliki beberapa tujuan, menurut Taswan (2010) tujuan sebuah bank memberikan kredit adalah:

1. Bagi bank

Kredit digunakan sebagai instrument bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas, selain itu dapat menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank lainnya dan kredit diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.

2. Bagi debitur

Pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga dapat menjamin keberlangsungan hidup perusahaan.

3. Bagi masyarakat (negara)

Pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya mampu menyejahterakan masyarakat.

Proses pemberian kredit dilakukan dalam waktu relatif cepat akan tetapi tetap berpegang dengan prinsip kehati-hatian, dengan proses kredit yang cepat maka diharapkan kepuasan debitur terhadap pelayanan bank tersebut dapat tercapai. Selain prinsip kehati-hatian dan kecepatan pelayanan, pihak bank perlu memperhatikan kepercayaan terhadap debitur. Menurut Kadarsan (1995) terdapat tiga kepercayaan dalam kaitannya dengan kredit, yaitu:

1. Kepercayaan kreditur bahwa debitur mampu untuk membayar kembali hutangnya.
2. Kepercayaan kreditur bahwa debitur akan membayar kembali hutangnya.
3. Kepercayaan dari semua pihak bahwa hukum-hukum yang sah dapat melindungi semua yang terlibat dalam transaksi tersebut, apabila ada pihak yang dirugikan karena ada pelanggaran persyaratan yang telah disetujui semuanya.

2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi volume kredit

Salah satu fungsi penting perbankan adalah intermediasi dana masyarakat dimana bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Penelitian ini akan melihat fungsi intermediasi bank melalui volume kredit konsumsi dengan dugaan bahwa inflasi, suku bunga kredit konsumsi, nilai tukar rupiah dan tabungan masyarakat memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya volume kredit konsumsi.

2.3.1 Inflasi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, inflasi ditandai dengan kenaikan harga secara umum, bila kenaikan harga hanya terjadi pada barang tertentu tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Terjadinya inflasi dipicu oleh dua hal, yaitu:

1. *Demand Pull Inflation*

Terjadi akibat tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya, tingginya permintaan disebabkan oleh banyaknya jumlah permintaan. Kondisi *demand pull inflation* digambarkan oleh banyaknya permintaan yang melebihi jumlah *output* (barang atau jasa) yang dihasilkan.

2. *Cost Push Inflation*

Penyebab inflasi ini adalah kenaikan biaya sehingga menyebabkan harga barang dan jasa yang dihasilkan juga meningkat. Kenaikan biaya dapat terjadi karena depresiasi nilai tukar terutama nilai tukar terhadap mata

uang negara partner dagang, selain itu kenaikan biaya dapat terjadi akibat bencana alam dan distribusi yang terganggu.

Hal lain yang dapat mendorong inflasi adalah perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

Bank Indonesia mengelompokkan inflasi menjadi dua, yaitu inflasi inti dan inflasi non inti.

1. Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:
 - a. Interaksi permintaan-penawaran
 - b. Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang
 - c. Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen

2. Inflasi non Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari :

a. Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*)

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.

b. Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*)

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

Inflasi memiliki dampak yang cukup besar bagi perekonomian suatu negara karena dengan tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dengan demikian, produk yang dihasilkan oleh perusahaan tidak dapat dibeli oleh masyarakat dan akhirnya ekonomi akan terganggu. Bila tingkat inflasi yang tinggi maka Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas untuk mengendalikannya, langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan *BI rate*, dengan meningkatkan *BI rate* maka suku bunga deposito akan meningkat maka akan menarik perhatian masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Peningkatan suku bunga deposito akan diikuti dengan peningkatan suku bunga kredit sehingga dapat menyebabkan penurunan volume kredit.

2.3.2 Suku Bunga Kredit

Suku bunga merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur yang merupakan balas jasa atas pinjaman yang diterima. Suku bunga dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap volume kredit karena bila suku bunga tinggi maka peminjam harus membayar bunga yang tinggi pula, dengan demikian suku bunga menjadi pertimbangan peminjam. Dalam penelitian ini suku bunga yang digunakan adalah suku bunga kredit karena suku bunga kredit dapat mempengaruhi keputusan pengambilan kredit. Suku bunga kredit yang rendah dapat mendorong minat debitur untuk meminjam di bank.

Tingkat suku bunga dapat berbeda hal ini ditentukan oleh jangka waktu, dan resiko. Jangka waktu merupakan batas waktu maksimal yang disepakati oleh pihak bank dengan pihak debitur untuk melunasi hutang, semakin lama jangka waktunya maka akan semakin tinggi tingkat bunga yang harus dibayarkan. Resiko selalu ada di dalam pemberian pinjaman salah satunya adalah resiko kredit macet, semakin tinggi resiko maka tingkat bunga juga akan semakin tinggi. Besar kecilnya resiko dipengaruhi oleh nominal kredit yang diberikan, semakin besar nominal kredit maka akan semakin besar risikonya sehingga tingkat suku bunga akan lebih tinggi.

Sistem bunga dapat digunakan sebagai alat promosi untuk meningkatkan volume kredit karena dengan sistem bunga tertentu pihak debitur mempunyai pertimbangan keuntungan yang akan diperoleh apabila melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo. Sistem bunga yang digunakan di Indonesia ada beberapa jenis, yaitu:

1. Sistem Bunga Flat

Bunga flat adalah sistem perhitungan suku bunga yang besarnya mengacu pada pokok hutang awal. Biasanya diterapkan untuk kredit barang konsumsi seperti *handphone*, *home appliances*, mobil atau kredit tanpa agunan (KTA).

Dengan menggunakan sistem bunga flat ini maka porsi bunga dan pokok dalam angsuran bulanan akan tetap sama.

2. Sistem Bunga Floating

Bunga floating adalah sistem perhitungan suku bunga yang besarnya dapat berubah mengikuti perubahan kondisi perekonomian.

3. Sistem Bunga Anuitas

Bunga anuitas adalah sistem perhitungan suku bunga yang besarnya berubah, pada awal angsuran perbandingan bunga lebih besar dari nilai pokok angsuran.

2.3.3 Nilai Tukar

Nilai tukar dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap volume kredit konsumsi, ketika nilai tukar mata uang domestik melemah maka harga barang impor akan meningkat, dengan demikian harga barang domestik mengalami peningkatan akhirnya berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi.

Kebijakan nilai tukar di Indonesia ada dua macam yaitu kebijakan nilai tukar *fixed* dan kebijakan nilai tukar fleksibel. Nilai tukar *fixed* akan digunakan bila suatu negara tidak ingin nilai mata uangnya fluktuatif, sebagai contoh China. Kebijakan ini dapat diambil apabila cadangan devisa yang dimiliki suatu negara

sangat besar karena selisih nilai tukar mata uang ditanggung oleh negara. Sedangkan untuk nilai tukar fleksibel, nilai tukar mata uang suatu negara dibiarkan berfluktuasi mengikuti perubahan kondisi ekonomi.

2.3.4 Tabungan Masyarakat

Menurut UU No. 10 Pasal 1 Ayat 9 tahun 1998 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Terkait dengan fungsi utama bank yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, maka jumlah tabungan masyarakat memiliki pengaruh terhadap volume kredit baik kredit investasi, modal kerja maupun kredit konsumsi. Bila tabungan masyarakat mengalami peningkatan maka harus diimbangi dengan jumlah kredit yang disalurkan, bila jumlah tabungan masyarakat meningkat namun volume kredit yang disalurkan tidak seimbang maka akan mengganggu operasional bank karena bank memiliki kewajiban untuk membayarkan bunga simpanan kepada nasabah namun pendapatan bunga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai.

2.4 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono dalam Yunan (2009), teori pertumbuhan ekonomi merupakan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan mengenai interaksi faktor-faktor tersebut

satu sama lain sehingga terjadi pertumbuhan. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik bruto dengan pendekatan pengeluaran karena akan terlihat pengaruh perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Produk Domestik Bruto (PDB)

Menurut Arsyad (1999:14) produk domestik bruto diartikan sebagai jumlah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh sektor-sektor produktif selama satu tahun fiskal. Sektor-sektor produktif yang dimaksud adalah:

1. Pertanian
2. Industri pengolahan
3. Pertambangan dan penggalian
4. Listrik, air minum dan gas
5. Bangunan
6. Perdagangan, hotel dan restoran
7. Pengangkutan dan komunikasi
8. Bank dan lembaga keuangan lainnya
9. Sewa rumah
10. Pemerintah dan pertahanan
11. Jasa-jasa lainnya

Produk domestik bruto berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara

tersebut, sehingga produk domestik bruto hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, produk nasional bruto memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan.

Penelitian ini akan melihat pengaruh volume kredit terhadap pertumbuhan ekonomi yang menggunakan produk domestik bruto sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menghitung nilai produk domestik bruto, namun penelitian ini hanya berfokus pada nilai produk domestik bruto dengan pendekatan pengeluaran dimana salah satu variabel untuk menghitung adalah konsumsi rumah tangga.

2.5 Penelitian terdahulu

Romi Julianto (2005) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kredit konsumsi di Sumatera Utara, variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kredit konsumsi (variabel dependen), laju inflasi (variabel independen), PDRB per kapita (variabel independen). Hasil penelitian adalah laju inflasi berpengaruh negatif pada kredit konsumsi, PDRB per kapita memberikan pengaruh positif terhadap kredit konsumsi.

Septy Andriani (2008) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi volume penyaluran kredit mikro, kecil dan menengah. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume penyaluran kredit pada jangka panjang dan jangka pendek. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis ECM (*Error Correction Model*). Variabel yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi volume penyaluran kredit mikro, kecil, dan menengah (MKM) bank umum, *Gross Domestic Product* (GDP), kapasitas kredit, *non performing loan*, suku bunga kredit berdasarkan penggunaan, serta suku bunga SBI. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data bulanan, pada periode tahun 2002 sampai 2007. Hasil penelitian menunjukkan dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui GDP berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap volume penyaluran kredit mikro, kecil, dan menengah. Namun, perubahan pada sertifikat bank Indonesia tidak signifikan karena kenaikan suku bunga SBI mempengaruhi sektor riil sangat lambat, sehingga tidak berpengaruh terhadap pada volume penyaluran kredit MKM. Selain itu, kapasitas kredit, suku bunga kredit dan *non performing loan* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume penyaluran kredit mikro, kecil dan menengah (MKM) di Indonesia.

Anggit Gumilar (2008) meneliti tentang pengaruh suku bunga terhadap kredit UMKM di Indonesia dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan memakai metode simultan karena diasumsikan variabel-variabel yang diamati memiliki hubungan timbal balik satu sama lain. Hasil penelitian tersebut adalah suku bunga SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit pada setiap jenis kredit dan jenis usaha, kecuali kredit investasi segmen usaha mikro. Pada segmen tersebut suku bunga SBI berpengaruh positif dan signifikan. Penyaluran kredit modal kerja pada segmen usaha menengah dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh suku bunga kredit, sedangkan pada sektor usaha mikro suku bunga kredit berpengaruh secara positif dan signifikan. Pada kredit investasi

suku bunga kredit berpengaruh secara negatif signifikan. Pada kredit konsumsi suku bunga kredit berpengaruh negatif signifikan.

Yoda Ditria (2008) berpendapat bahwa tingkat suku bunga, perubahan nilai tukar rupiah dan jumlah ekspor berpengaruh terhadap jumlah kredit maupun ketiga jenis kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah ekspor berjalan searah dengan jumlah kredit dan ketiga jenis macamnya dimana jika ekspor mengalami kenaikan maka seluruh macam kredit juga mengalami kenaikan. Tingkat suku bunga bergerak berlawanan terhadap jumlah kredit maupun ketiga macam jenis kredit lainnya, dimana jika tingkat suku bunga bergerak naik maka akan mengurangi jumlah kredit termasuk didalamnya kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Sama dengan pengaruh tingkat suku bunga, pengaruh nilai tukar terhadap jumlah kredit dan ketiga jenis kredit lainnya berpengaruh secara berlawanan, dimana jika kurs naik maka akan mengurangi jumlah kredit baik itu kredit modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi.

2.6 Hipotesis

Dalam beberapa penelitian yang dilakukan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi volume kredit konsumsi, selain itu dalam penelitian Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (2009) yang menjelaskan bahwa PDB Indonesia selama beberapa tahun terakhir banyak didukung oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada kondisi dimana inflasi tinggi namun konsumsi juga tinggi, terdapat indikasi bahwa konsumsi terjadi karena adanya daya dorong dari kredit, terutama kredit konsumsi, yang menyebabkan daya beli masyarakat tetap tinggi. Menurut Romi Julianto (2005) laju inflasi berpengaruh negatif terhadap kredit konsumsi. Berdasarkan argumentasi di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Inflasi berpengaruh terhadap volume kredit konsumsi

Suku bunga kredit dipilih sebagai salah satu faktor yang diduga mempengaruhi volume kredit konsumsi karena suku bunga yang tinggi menjadi pertimbangan para debitur karena dengan suku bunga yang tinggi maka tingkat pengembalian kredit debitur kepada bank akan meningkat, sedangkan bila suku bunga rendah maka dapat menarik minat debitur untuk meminjam uang di bank. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anggit Gumilar (2008), suku bunga kredit berpengaruh negatif signifikan pada kredit konsumsi. Berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap volume kredit konsumsi

Nilai tukar dapat menjadi salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap volume kredit konsumsi, ketika nilai tukar mata uang domestik melemah maka harga barang impor akan meningkat, dengan demikian harga barang domestik mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan oleh Yoda Ditria (2008) berpendapat bahwa nilai tukar Rupiah terhadap USD berpengaruh secara berlawanan terhadap jumlah kredit. Berdasarkan penelitian tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Nilai tukar berpengaruh negatif terhadap volume kredit konsumsi

Jumlah tabungan masyarakat memiliki pengaruh terhadap volume kredit baik kredit investasi, modal kerja maupun kredit konsumsi. Bila tabungan masyarakat mengalami peningkatan maka harus diimbangi dengan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank, bila jumlah tabungan masyarakat meningkat namun volume kredit yang disalurkan tidak seimbang maka akan mengganggu operasional bank karena bank memiliki kewajiban untuk membayarkan bunga simpanan kepada nasabah namun pendapatan bunga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai. Dari penjelasan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H4: Tabungan masyarakat berpengaruh terhadap volume kredit konsumsi

Penelitian ini akan melihat pengaruh volume kredit konsumsi terhadap produk domestik bruto (PDB), produk domestik bruto yang digunakan adalah produk domestik bruto dengan pendekatan pengeluaran karena dengan peningkatan volume kredit konsumsi diharapkan daya beli masyarakat akan meningkat, perubahan daya beli masyarakat dapat dilihat dari tingkat pengeluaran konsumsi. Tingkat pengeluaran konsumsi merupakan salah satu komponen untuk menghitung produk domestik bruto dengan pendekatan pengeluaran sehingga perubahan pengeluaran konsumsi akan berpengaruh kepada produk domestik bruto. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H5: Volume kredit konsumsi berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi

H6: Pengeluaran konsumsi berpengaruh terhadap produk domestik bruto

Gambar 2.1

Skema Penelitian Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah, Tabungan Masyarakat, terhadap Volume Kredit Konsumsi

